

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya kasus balita gizi buruk yang terjadi pada saat ini di kota Yogyakarta membuat warga masyarakat resah. Pada dasarnya masalah gizi timbul karena perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dan kecukupan gizinya. Bila konsumsi gizi selalu kurang dari kecukupan gizi maka seseorang akan menderita kekurangan gizi atau jika sudah akut disebut dengan gizi buruk.

Salah satu penyebab kurang gizi diantaranya adalah karena daya beli yang rendah dari para keluarga yang kuarang mampu. Nampaknya ada hubungan yang erat antara pendapatan dan status gizi anak – anaknya. Karena itu penyuluhan gizi penting sekali peranannya dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat khususnya anak-anak balita.

Masalah gizi buruk kini sudah menjadi masalah yang sangat pelik dan patut dijadikan prioritas oleh pemerintah. Sudah selayaknya pula semua sector wajib dan untuk memperhatikan masalah ini. Hal ini dikarenakan sudah begitu banyak jiwa yang terenggut dan lebih ironisnya lagi korban–korban tersebut sebagian besar adalah balita (anak di bawah lima tahun). Untuk itu kita tidak

boleh memandang sebelah mata permasalahan ini atau generasi penerus

Berikut ini adalah jumlah balita penderita gizi buruk yang ada di lima kabupaten/kota di provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2007 – 2009.

Tabel. 1

Jumlah Balita Kurang Gizi dan Penderita Gizi Buruk

No	Kota/Kabupaten	Tahun		
		2007	2008	2009
1	Yogyakarta	214	188	198
2	Sleman	196	217	185
3	Bantul	178	183	174
4	Kulonprogo	276	259	266
5	Gunungkidul	209	187	190

Sumber: Dinkes Kota Yogyakarta, diolah

Dengan adanya fenomena diatas, maka pemerintah kota Yogyakarta berusaha untuk menanggulangi gizi buruk yang terjadi di Yogyakarta. Kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam menanggulangi masalah gizi buruk sangatlah penting. Maka pada tahun 2009 walikota kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota (perwal) no.12 tahun 2009. Peraturan walikota no.12 tahun 2009 yang mengatur pembentukan Rumah Pemulihan Gizi Balita (RPG Balita) sebagai upaya untuk mengatasi masalah gizi buruk yang terjadi kota Yogyakarta. RPG Balita adalah tempat untuk penatalaksanaan masalah gizi dan pemulihan pasca perawatan rumah sakit, tujuan di bentuknya rumah pemulihan gizi balita seperti yang tertuang dalam perwal no.12 tahun 2009 yaitu:

1. Menyediakan tempat untuk penanganan komprehensif bagi balita dengan

2. Menangani balita dengan masalah gizi secara komprehensif dan sesuai kewenangan,
3. Mendidik keluarga dan orang tua untuk perawatan kesehatan dan pengasuhan anak.

Dengan adanya perwal no. 12 tahun 2009 pemerintah kota Yogyakarta diharapkan mampu mengatasi masalah gizi buruk. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan dari perwal no 12 tahun 2009 oleh pemerintah kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk tahun 2009-2011 melalui perwal no.12 tahun 2009?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan walikota no. 12 tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat peneletian

1. Tujuan Peneletian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peraturan walikota no.12 tahun 2009 di Implementasikan oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai upaya menanggulangi balita gizi buruk di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan perwal no.12 tahun 2009 tentang gizi buruk

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan masukan atau input bagi pemerintah kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat .
- b. Penelitian ini juga di gunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah guna mengembangkan pengetahuan secara umum.
- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang gizi untuk pertumbuhan anak-anaknya, dapat dijadikan wacana bagi masyarakat untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi masalah gizi buruk yang terjadi di Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori dari suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting sehingga permasalahan yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Teori adalah konsep yang saling berhubungan menurut aturan logis menjadi bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah¹.

Menurut Masri Singarimbunan dan Sofyan Efendi:

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.

Sehingga menurut definisi tersebut di dalam suatu penelitian harus mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Serangkaian preposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan.
2. Menerangkan sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan mana yang berhubungan dengan konsep lainya dan bagaimana caranya.

Untuk memberikan gambaran mengenai kajian yang akan di teliti untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi balita gizi buruk melalui perwal no.12 tahun 2009 di Yogyakarta, maka peneliti akan mendasarkan pada tinjauan atau kajian yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan fenomena yang akan dikaji atau diteliti sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan untuk semua orang dalam hal ini public adalah umum. Dalam pengambilan keputusan ini melalui proses dan pemilihan-pemilihan alternatif yang cukup banyak dengan menimbang segala akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Menurut Bill Jenkins Kebijakan adalah ; “Sekelompok keputusan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok actor

menyangkut pemilihan tertentu dimana keputusan-keputusan ini, pada prinsipnya harus berada dalam rentang kesanggupan actor-aktor ini untuk mewujudkannya”².

Kebijakan menurut Carl Friedrich, adalah: “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu serta mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”³

Winarno menyatakan bahwa konsep kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi, yakni: *pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jika lembaga legislatif menetapkan

² D. Winarno, “The Role of Public Policy in the Development of the Media Industry”, *Media Indonesia*, 2005, hal. 8

undang-undang yang mengharuskan pengusaha menggaji karyawannya dengan upah minimum menurut undang-undang, tetapi tidak ada sesuatupun yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut sehingga tidak ada perubahan yang timbul dalam perilaku ekonomi, maka hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan publik mengenai kasus ini sebenarnya merupakan salah satu dari nonregulasi upah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Kebijakan tidak campur tangan mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi besar terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif.⁴

Menurut pandangan Dunn tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

b. Tahap formulasi kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia.

e. Tahap penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan⁵.

⁵ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Harindia Graha Widia, 2001, hal 134.

Di dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Input (Masukan)

Dalam model tradisional input berasal dari lingkungan, kelompok, dengan cara-cara tertentu dan berdampak pada system politik. Semua lingkungan didefinisikan secara luas dalam istilah-istilah social, ekonomi, fisik dan politik. Lingkungan tersusun hanya individu-individu, organisasi maupun partai-partai politik yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berlainan.

b. Proses Politik (Formulasi Kebijakan)

Dalam proses ini terjadi pengolahan maslaah-masalah yang telah terkumpul dari kelompok kepentingan yang secara terbuka mempengaruhi, mengemukakan pendapat kepada pembuat keputusan berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Pemerintah memproses kebijakan yang nantinya akan membuahkan kebijakan baru.

Dalam proses keputusan alternatif, pilihan-pilihan mulai diperhitungkan dan dipertimbangkan baik buruknya dari akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dan proses ini dipandang sangat penting dari semua proses yang dijalankan karena ini merupakan suatu hal

c. Output (Hasil Kebijakan)

Kebijakan sering dipandang sebagai respon terhadap tekanan (pressure), namun mengapa terkadang tidak ada tekanan.⁶ Kebijakan Pemerintah akan mendapatkan tekanan dari lingkungan apabila tidak memenuhi keinginan dari masyarakat atau sebaliknya kebijakan tidak akan mendapatkan tekanan apabila sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan telah melalui tahap pemberlakuan dalam tahap perundang-undangan maka pada tahap selanjutnya diadakan pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Pelaksanaan tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan. Maka bagaimanapun baiknya sebuah kebijakan baik berupa undang – undang , keputusan presiden, peraturan daerah, maupun peraturan walikota kalau belum ada tindak lanjutnya dalam program maka kebijakan tersebut tidak banyak berarti karena belum memberikan implikasi tertentu kepada masyarakat.

Menurut Ripley dan Franklin bahwa implementasi *“is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output”*. Ini menggambarkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah perundangan ditetapkan yang memberikan otoritas

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting dalam pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.⁹

Keberhasilan implementasi suatu program adalah hal penting dari keseluruhan proses kebijakan. Keberhasilan implementasi program itu sendiri merupakan cermin bahwa kebijakan program yang ada itu telah mencapai tujuan. Atau dengan kata lain bahwa suatu kebijakan yang telah diberlakukan perlu diwujudkan dalam bentuk implementasi (suatu tindakan) untuk mencapai sasaran yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang nyata.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan. Ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan ini merupakan uraian tujuan-tujuan keputusan-keputusan kebijaksanaan itu bisa dilihat dari indikator-indikator ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan. Dengan kata lain, *performance* implementasi kebijakan dapat dilihat dengan menganalisis apakah tujuan-tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh dapat direalisasikan.

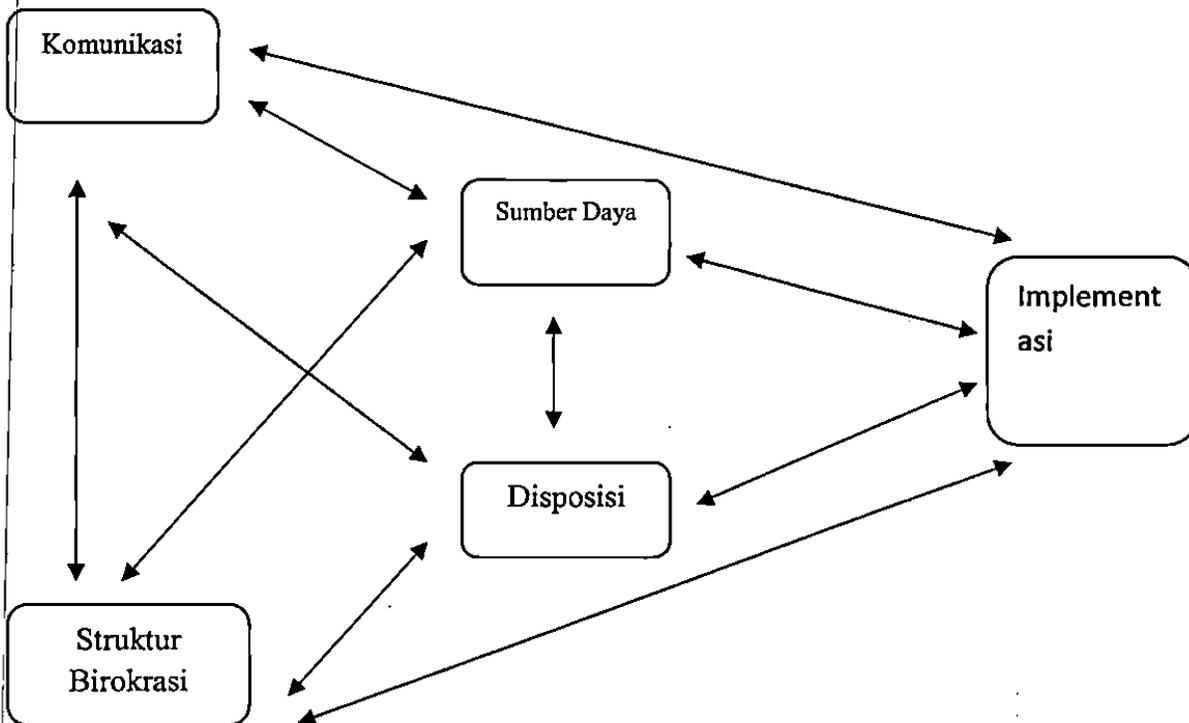
- b. Sumber daya kebijaksanaan. Sumber daya yang tersedia sangat penting baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*) karena menunjang keberhasilan implementasi. Sumber daya dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Implementasi yang efektif menghendaki adanya ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan program yang jelas. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika itu dinyatakan dengan jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu. Namun demikian kejelasan itu sendiri masih perlu ditunjang dengan pola komunikasi antar organisasi yang jelas, sehingga tujuan yang akan dicapai tersebut dapat dipahami oleh para pelaksana program. Oleh karenanya agar implementasi dapat berhasil dengan baik seringkali menuntut adanya mekanisme dan dapat meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana akan bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijaksanaan.
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana. Karakteristik badan pelaksana ini menurut beberapa ahli administrasi mempengaruhi *performance* implementasi kebijaksanaan. Menurut Meter dan Horn karakteristik tersebut mencakup enam faktor yaitu:

- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
 - 3) Sumber daya politik suatu organisasi.
 - 4) Vitalitas suatu organisasi.
 - 5) Derajat keterbukaan komunikasi.
 - 6) Keterkaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dengan pelaksana keputusan.
- e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian peminat kebijakan publik, sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi mendapat perhatian yang kecil. Faktor tersebut telah berpengaruh secara tajam pada kinerja dari badan-badan pelaksana.
- f. Karakteristik pelaksana. Anggapan pelaksana dalam organisasi dimana kebijaksanaan itu diterapkan merupakan alat penyaring dari komponen setiap yang telah disebut di atas. Dengan kata lain respon dari pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap implementasi. Ada tiga elemen yang mungkin muncul dan mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijaksanaan yaitu kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut. Ketiga elemen tersebut penting untuk diperhatikan dalam proses

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah itu, sejak pembentukan kebijakan harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini berusaha menggabungkan teori-teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh beberapa pakar implementasi kebijakan di atas. Dengan menyeleksi variabel yang tepat dan sesuai dengan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil yang lebih dalam memecahkan persoalan yang ada dalam penelitian ini.

George C. Edward III dalam Subarsono berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variable-variable tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain¹³.

Gambar 1.
Variable Implementasi menurut Edward III



Dari gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Edward III bahwa dalam implementasi kebijakan yang efektif, syarat pertama yakni bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan pemerintah-pemerintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah dapat diikuti¹⁴.

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus transmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi

distorsi Implementasi¹⁵. Jika kebijakan akan diimplementasikan maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya dipahami tetapi petunjuk-petunjuk tersebut harus jelas.

b. Sumber Daya Pelaksana

Selanjutnya menurut Subarsono meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya financial, selain itu suatu kebijakan hanya akan menjadi teori saja tanpa ada sumber daya¹⁶.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Namun apabila implementor memiliki sikap atau pespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif¹⁷.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan. Salah satu aspek struktur yang penting adalah adanya standard operating procedures (SOP) karena SOP

¹⁵ Subarsono, op.cit, Hal: 90.

¹⁶ Ibid, Hal: 91.

¹⁷ Ibid, Hal: 92.

merupakan pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya akan menyebabkan kinerja organisasi tidak fleksibel.

3. Peraturan Walikota kota Yogyakarta tentang rumah pemulihan gizi balita kota Yogyakarta

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- 1) Menyediakan tempat untuk penanganan secara komprehensif bagi balita dengan masalah gizi di Kota Yogyakarta;
- 2) Menangani balita dengan masalah gizi secara komprehensif sesuai dengan kewenangan;
- 3) Mendidik keluarga dan orang tua untuk perawatan kesehatan dan pengasuhan anak ¹⁸.

b. Kewenangan

- 1) Menyusun program dan rencana kerja serta membuat jadwal kegiatan RPG Balita.
- 2) Melakukan upaya promotif berupa penyuluhan kepada masyarakat, orangtua balita.
- 3) Melakukan upaya preventif berupa demonstrasi pengasuhan anak.

- 4) Melakukan upaya kuratif berupa penanganan dan pengobatan sesuai dengan petunjuk
- 5) dari dokter.
- 6) Melakukan upaya rehabilitasi berupa penatalaksanaan paska perawatan Rumah sakit¹⁹.

c. Sumber dana

Sumber dana Kegiatan RPG Balita diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SKPD terkait dan sumber-sumber lain yang sah²⁰.

E. Definisi Konsepsional

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian dan jika masalah dan kerangka teorinya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya merupakan definisi: secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tertentu²¹.

Definisi konsepsional bisa juga merupakan suatu pengertian dari kelompok atau yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih segar untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian, atau pembatalan pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

Definisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

1. Kebijakan Publik

Secara garis besar, kebijakan publik mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik adalah sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan untuk menghadapi masalah public.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan atau tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok pemerintah, dan swasta. Dalam hal ini diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan pada keputusan kebijakan serta mencoba mempelajari sebab – sebab keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan melalui pembahasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”²².

1. Implementasi perwal no. 12 tahun 2009 pemerintah kota Yogyakarta
 - a. Penyediaan tempat untuk penanganan secara komprehensif bagi balita dengan masalah gizi di Kota Yogyakarta.
 - b. Penanganan balita dengan masalah gizi secara komprehensif sesuai dengan kewenangan;
 - c. Pendidikan keluarga dan orang tua untuk perawatan kesehatan dan pengasuhan anak
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program perwal no. 12 tahun 2009 pemerintah kota Yogyakarta
 - a. Komunikasi
 - 1) Tingkat pemahaman pelaksana
 - 2) Pengetahuan pelaksana
 - 3) Keselarasan tindakan antar organisasi
 - 4) Kejelasan informasi
 - 5) Pemahaman kelompok sasaran
 - b. Sumber Daya Pelaksana
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - 2) Anggaran Dana
 - 3) Fasilitas Sarana dan Pra Sarana
 - c. Sikap Pelaksana
 - 1) Komitmen
 - 2) Koordinasi dan Kerjasama

- 3) Disiplin
- d. Struktur Birokrasi
- 1) Tidak panjang
 - 2) SOP Mudah dijalankan
 - 3) Tanggungjawab terbagi secara jelas

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk itu peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejala yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan situasinya.²³

Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapakan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hadari Nawawi memberikan pengertian metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, kelompok/masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴

²³ Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal.3

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 2001, hal.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri metode penelitian deskriptif diatas, maka operasionalnya berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya disusun, diolah, dan ditafsirkan. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut diberi makna yang rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat kritis.

2. Alasan Pemilihan

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Puskesmas Wirobrajan Yogyakarta. Pemilihan di Kantor Dinas Kesehatan agar penulis dapat mudah mendapatkan data dan mengetahui langsung peran pemerintah kota dalam menangani masalah gizi buruk yang terjadi di Yogyakarta. Dinas Kesehatan, adalah instansi yang menangani masalah kesehatan masyarakat kota Yogyakarta. Sedangkan Puskesmas wirobrajan adalah salah satu puskesmas yang bekerjasama dengan kader setempat di masyarakat yang menangani masalah gizi buruk dan sudah ada ahli gizinya.

3. Unit Analisis

Adapun unit yang menjadi analisa dalam penelitian ini adalah:

Umum(Sekum) Rumah Pemulihan Gizi kota Yogyakarta, dan ibu Rini Aprilia staf di bidang gizi anak dari Puskesmas Wirobrajan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung. Dimana peneliti secara langsung melihat kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, sehingga ini bermanfaat untuk mendukung dan melengkapi analisa data primer dan data sekunder.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen –dokumen, catatan-catatan (jurnal) atau laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan dengan obyek penelitian yang masih relevan agar dapat digunakan untuk memperjelas dan mendukung data-data hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Dalam teknik ini ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk sirkulus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya tiga komponen dalam model analisa interaktif dari Milles dan Huberman dapat dijelaskan dibawah ini yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Pengumpulan data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

2. Data Display (Penyajian data)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut²⁵.